



KATALOG BPS: 3303002.91

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

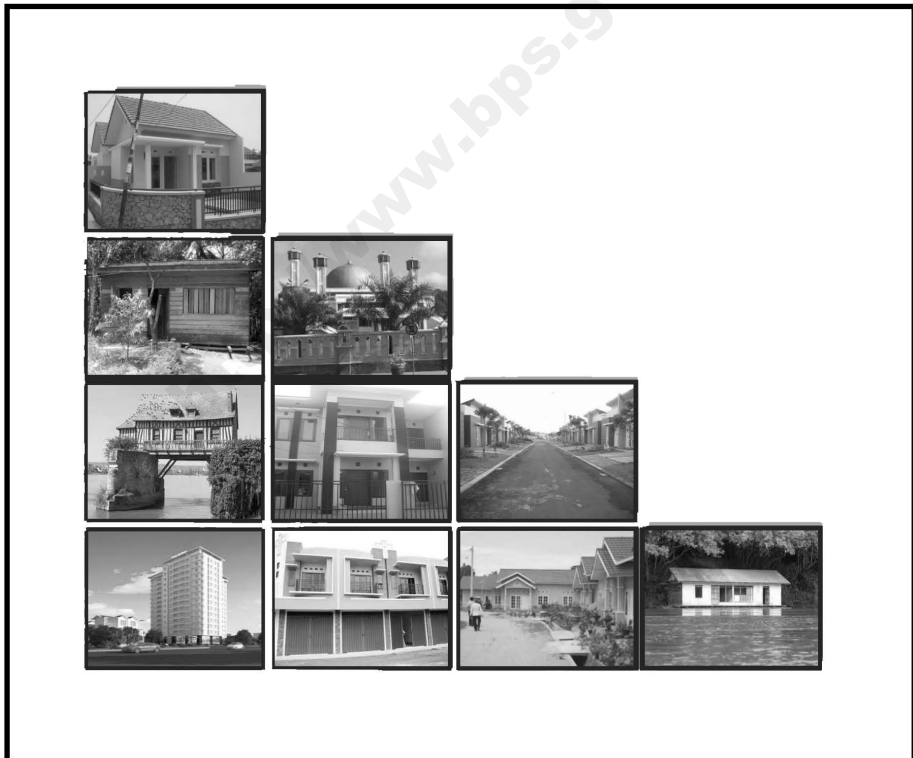
(Hasil Sensus Penduduk 2010)



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

(HASIL SENSUS PENDUDUK 2010)



Statistik Perumahan Provinsi Papua Barat

(Hasil Sensus Penduduk 2010)

ISBN: 978-979-064-450-2

Nomor Publikasi: 042300.1134

Katalog BPS: 3303002.91

Ukuran Buku: JIS B5 (7,17 inch x 10,12 inch)

Jumlah Halaman: 38 Halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Gambar kulit:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Dharmaputra

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disamping mengumpulkan keterangan demografi juga mengumpulkan data perumahan. Publikasi ini merupakan publikasi dari hasil pengumpulan data Perumahan SP 2010 yang diterbitkan dalam bentuk buku untuk setiap provinsi dan buku dengan data agregat Indonesia.

Buku Statistik Perumahan ini menyajikan gambaran analisis diskriptif situasi dan perkembangan perumahan. Data yang disajikan meliputi data tentang status kepemilikan bangunan, jenis dan luas lantai, sumber penerangan utama, sumber air minum, sanitasi, bahan bakar untuk memasak, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penentuan kebijakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta pengguna data lain dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi program pembangunan perumahan.

Kepada tim penulis yang membuat publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan publikasi ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2011

Deputi Bidang Statistik Sosial



Drs. Wynandin Imawan, M.Sc

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	2
BAB II KARAKTERISTIK PERUMAHAN	9
2.1 Kepemilikan/Penguasaan Bangunan.....	10
2.1.1. Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	10
2.1.2. Bukti Kepemilikan.....	12
2.2 Jenis dan Luas Lantai.....	16
2.2.1. Jenis Lantai Terluas.....	16
2.2.2. Luas Lantai.....	17
2.3 Sumber Penerangan Utama.....	19
2.4 Sumber air Minum.....	20
2.5 Sanitasi.....	22
2.5.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	22
2.5.2. Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	22
2.6 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari.....	24
2.7 Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal.....	25
2.8 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	26
BAB III PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dokumen, 2010.....	10
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	11
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	11
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	14
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	15
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2010.....	16
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Rumah Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	18
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2010.....	19
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2010.....	21
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2010.....	22
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2010.....	23
Tabel 12. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak dan Tipe Daerah, 2010.....	24
Tabel 13. Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	25
Tabel 14. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010.....	26
Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet Selama 3 Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010.....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	12
Gambar 2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	13
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	14
Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita dan Tipe Daerah, 2010.....	17
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Listrik menurut Kabupaten/kota, 2010.....	20
Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki jamban dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	23

<http://www.bps.go.id>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan merupakan kebutuhan utama disamping pangan dan sandang bagi setiap orang. Perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Selain merupakan kebutuhan pokok, keadaan perumahan juga mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting pula terhadap produktivitas kerja seseorang. Dengan demikian keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi. Tetapi di lain pihak kemampuan untuk mengusahakan adanya perumahan yang layak tergantung sekali daripada adanya perkembangan serta pembangunan ekonomi.

Keadaan perumahan di Papua Barat masih jauh daripada mencukupi, baik dilihat dari jumlah maupun kualitas/kondisi perumahannya yang sebagian besar belum memenuhi syarat-syarat perumahan yang layak. Masalah perumahan biasanya terdapat di daerah perkotaan yang ditandai dengan sangat kurangnya jumlah rumah yang ada dibandingkan dengan banyaknya penduduk, serta banyaknya rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kehidupan dan pembangunan yang layak, seperti perkampungan-perkampungan dipinggir kota dan gubuk-gubuk liar didalam kota. Demikian pula terdapat kesulitan-kesulitan mengenai tanah, fasilitas air minum, keadaan penerangan, kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Pembangunan perumahan sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan agar permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dapat teratasi. Agar pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan optimal dan lebih terarah, maka diperlukan data yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan.

Data yang disajikan dalam publikasi ini, seluruhnya memanfaatkan data perumahan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Data perumahan yang disajikan meliputi status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, jenis lantai, luas lantai, sumber penerangan, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, bahan bakar untuk memasak sehari-hari, penguasaan telepon, dan akses internet selama tiga bulan terakhir. Untuk memudahkan pembaca,

publikasi ini juga dilengkapi dengan definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data.

Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik disertai ulasan atau analisis deskriptif pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibedakan menurut daerah tempat tinggalnya (perkotaan/perdesaan). Diharapkan melalui penyajian data seperti itu, pengguna data akan lebih mudah untuk memahami dan lebih tertarik untuk membacanya.

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penulisan Publikasi Ringkas Hasil Sensus Penduduk 2010 Perumahan Penduduk Provinsi Papua Barat adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang perumahan yang bersumber dari data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Data perumahan yang digunakan menerangkan karakteristik keadaan bangunan yang ditempati oleh rumah tangga, karena SP2010 adalah sensus yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.

SP2010 mencakup seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumahtangganya, meskipun menetap di wilayah teritorial Indonesia, tidak dicakup dalam pencacahan SP2010. Sedangkan anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumahtangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyajian pada publikasi ini dibagi menjadi tiga bab. Bab Pertama, yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, sistematika penulisan, serta konsep dan definisi. Bab Kedua adalah gambaran umum mengenai perumahan di Provinsi Papua Barat hasil SP2010 serta Bab Ketiga adalah Penutup.

1.4. Konsep dan Definisi

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan

induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Contoh Bangunan Fisik: rumah, hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Milik sendiri adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

Kontrak adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus dimuka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seseorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Status kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori diatas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.

Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART.

Sertifikat lain adalah Tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa:

- SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan)
- SHP (Sertipikat Hak Pakai)
- SHM-SRS (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun)

Lainnya adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) seperti girik, akte jual beli

Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan *Letter C* yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah, baik yang sudah dipecah maupun induknya.

Akte Jual Beli adalah Akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk lainnya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU).

Lantai adalah alas/dasar suatu bangunan tempat tinggal responden. Jenis lantai terdiri dari keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu, tanah, dan lainnya. Lantai ubin yang dilapisi karpet atau vinil tetap dikategorikan ubin. Jika lantai bangunan tempat tinggal lebih dari satu jenis, pilih yang terluas.

Luas Lantai adalah keseluruhan luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.

Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah keseluruhan luas dari semua tingkat yang ditempati.

Catatan:

1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.

2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.
3. Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.

Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).

Listrik PLN meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. Dalam SP2010, rumah tangga yang tinggal di apartemen dianggap memiliki sumber penerangan listrik PLN meteran.

Listrik PLN tanpa meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.

Bukan listrik adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri).

Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 600 ml, 1,5 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas, seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.

Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta. Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. Ledeng eceran adalah rumah tangga

yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.

Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung.

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air kemudian dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumannya tetap mata air atau air hujan.

Mata air terlindung adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai.

Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

Sumber air lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

Fasilitas buang air besar/jamban bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.

Tidak ada fasilitas tempat buang air besar/jamban adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, yang terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik mempunyai bak resapan maupun tidak.

Tempat pembuangan tanpa tangki septik adalah tempat pembuangan tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.

Tidak punya tempat pembuangan adalah tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

Penguasaan Telepon adalah penguasaan rumah tangga atas telepon kabel (Public Switched Telephone Network, flexi home). Tanpa kabel (telepon seluler/*Hand Phone/Mobile Phone*)

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet mencakup komputer yang ada di dalam rumah (yang dikuasai oleh rumah tangga) dan di luar rumah (warnet, kantor, sekolah, rumah saudara, rumah teman, dan lain-lain).

Akses Internet adalah mengoperasikan media internet secara aktif, termasuk yang mengakses internet dengan menggunakan telepon seluler (HP).

Bahan bakar adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak seperti listrik, gas, minyak tanah, arang, kayu, lainnya.

<http://www.bps.go.id>

BAB II. KARAKTERISTIK PERUMAHAN

Sesuai dengan cakupan SP2010 yang meliputi seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap maka bersamaan pelaksanaan SP2010 dicacah pula seluruh bangunan dan rumah tangga. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap antara lain tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, dan penghuni perahu/rumah apung. Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumah tangganya, meskipun menetap di wilayah teritorial Indonesia tidak dicakup dalam SP2010. Sebaliknya anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumahtangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.

Bervariasinya tempat tinggal penduduk tersebut tentunya membuat mekanisme pendataan tidak bisa disamaratakan untuk semua rumah tangga. Untuk mengakomodasi hal tersebut maka pendataan SP2010 menggunakan kuesioner/dokumen yang berbeda untuk tiap-tiap kondisi, yaitu:

1. Kuesioner SP2010-C1 (selanjutnya disebut C1), digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga umum.
2. Kuesioner SP2010-C2 (selanjutnya disebut C2), digunakan untuk pencacahan rumah tangga yang tinggal di lokasi khusus atau "tidak terpetakan", masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan untuk anggota Korps Diplomatik RI beserta ART-nya di luar negeri.
3. Kuesioner SP2010-L2 (selanjutnya di sebut L2), digunakan untuk mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap seperti tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, pengungsi dan suku terasing.

Sebagian besar rumah tangga (99,77 persen) berhasil didata dengan dokumen C1 sedangkan sisanya didata dengan dokumen C2 dan L2. Jumlah rumah tangga menurut jenis kuesioner/dokumen dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dokumen, 2010

Jenis Dokumen	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
C1	167.728	99,77
C2 Umum dan L2	393	0,23
Jumlah	168.121	100,00

Sumber: SP 2010

Dengan kuesioner C1 maka informasi perumahan pada setiap rumah tangga akan didapatkan secara lengkap, sementara dengan dokumen lainnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak ditanyakan.

Idealnya satu bangunan tempat tinggal dihuni satu rumah tangga, dalam kenyataannya, tidak sedikit suatu bangunan tempat tinggal yang dihuni dua atau lebih rumah tangga. Sementara itu pencacahan SP2010 menggunakan pendekatan rumah tangga, akibatnya bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh dua atau lebih rumah tangga akan dicacah berkali-kali sesuai dengan banyaknya rumah tangga yang ada (cacah ganda). **Karena itu, perlu dipahami bahwa hasil SP2010 tidak menggambarkan banyaknya bangunan tempat tinggal (rumah) di Provinsi Papua Barat, melainkan memperlihatkan gambaran tentang banyaknya rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang menghuni bangunan tempat tinggal menurut karakteristiknya.**

2.1. Kepemilikan/Penguasaan Bangunan

2.1.1. Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010

Status Kepemilikan Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	48,34	70,46	63,87
Sewa	27,58	8,89	14,46
Kontrak	6,14	2,82	3,81
Lainnya	17,94	17,83	17,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Menurut hasil SP 2010, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Provinsi Papua Barat sebesar 63,87 persen. Selain rumah milik sendiri, rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 14,46 persen sewa, 3,81 persen kontrak dan 17,86 persen lainnya. Jika dilihat dari tipe daerahnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di perkotaan sebesar 48,34 persen dan di perdesaan sebesar 70,46 persen.

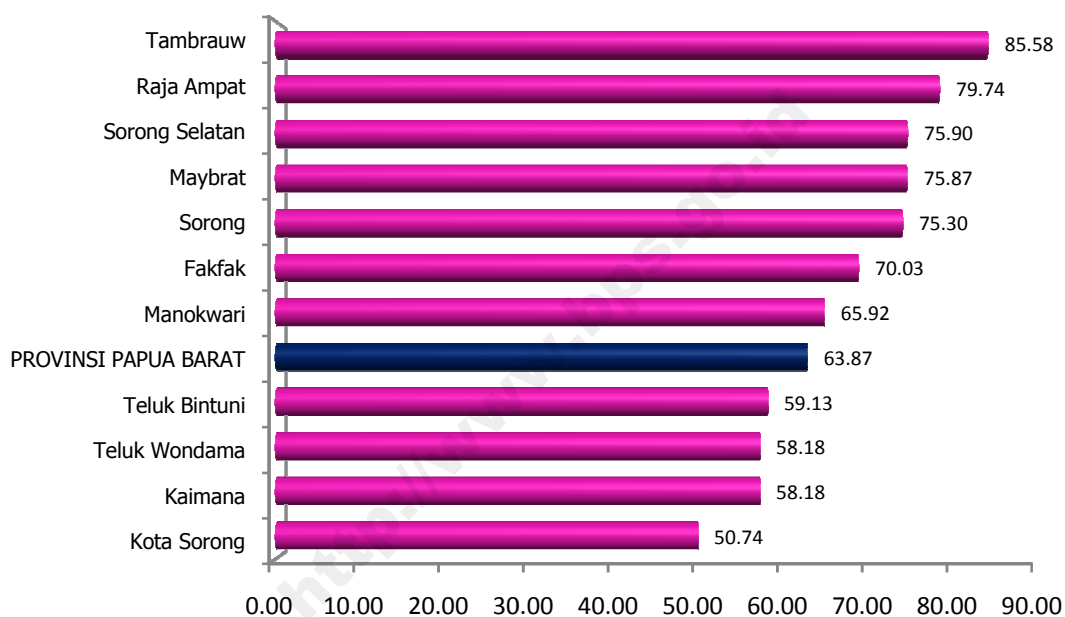
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	47,90	51,70	70,66	68,46	64,00	62,66
Sewa	27,49	28,33	8,70	10,76	14,20	16,85
Kontrak	6,38	4,33	2,86	2,49	3,89	3,12
Lainnya	18,23	15,64	17,78	18,29	17,91	17,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Jika dilihat menurut jenis kelamin kepala rumah tangganya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki (64,00 persen) sedikit lebih banyak daripada rumah tangga yang dikepalai perempuan (62,66 persen). Sebaliknya untuk rumah tangga yang menempati rumah sewa dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki (14,20 persen) lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai perempuan (16,85 persen).

Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yang terendah terdapat di Kota Sorong yaitu sebesar 50,74 persen, sedangkan persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Tambrau yaitu sebesar 85,58 persen.

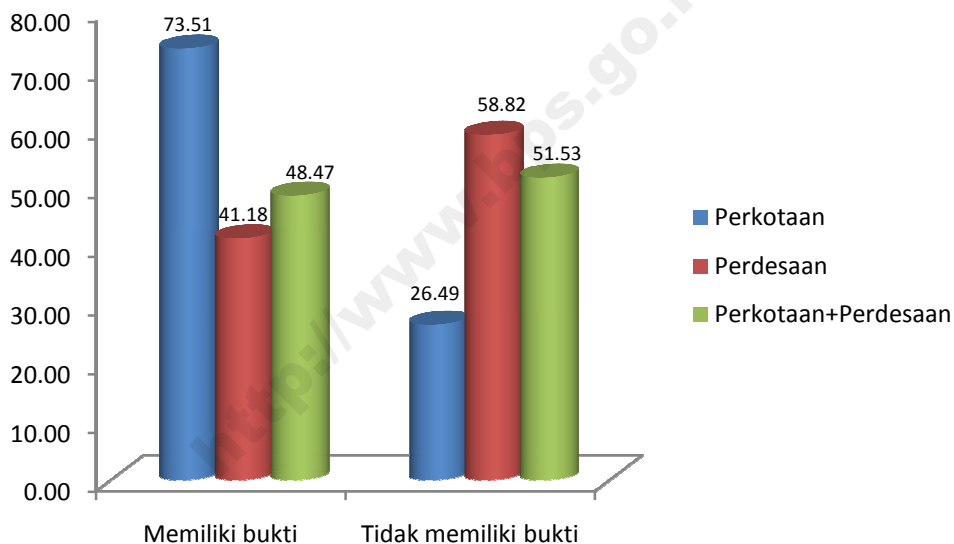
2.1.2. Bukti Kepemilikan

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah tempat tinggal, maka setiap petak tanah seharusnya mempunyai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Dengan adanya bukti kepemilikan atas suatu petak tanah, diharapkan dapat menjadi kekuatan hukum jika suatu saat terjadi sengketa atas tanah tersebut.

Informasi bukti kepemilikan tanah tempat tinggal yang dikumpulkan melalui Sensus Penduduk 2010 yaitu mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS), dan lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain). Pertanyaan mengenai bukti kepemilikan tempat tinggal ini hanya ditanyakan kepada rumah tangga yang status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggalnya adalah milik sendiri.

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah , 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Hasil SP2010 menunjukkan persentase secara total terhadap rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal adalah sebesar 48,47 persen. Jika dilihat menurut tipe daerahnya, persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah di perkotaan (73,51 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (41,18 persen).

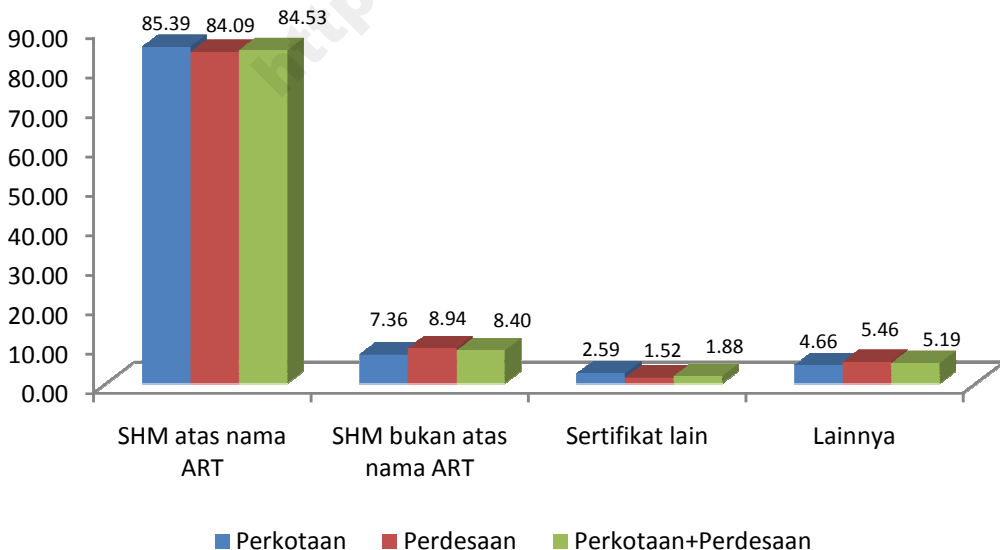
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memiliki	73,37	74,56	41,12	41,79	48,18	51,15
Tidak Memiliki	26,63	25,44	58,88	58,21	51,82	48,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Untuk rumah yang memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rumah tangga yang dikepalai laki-laki maupun perempuan. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan (51,15 persen) sedikit lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki (48,18 persen).

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal dibedakan lagi menurut jenis bukti kepemilikan yang dimiliki, yaitu SHM atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, sertipikat lain dan lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain). Di Provinsi Papua Barat, sebagian besar jenis bukti kepemilikan yang dimiliki adalah SHM atas nama ART yaitu 84,53 persen. Baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, persentase yang memiliki SHM atas nama ART sudah cukup tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam meningkatkan status kepemilikan tanah dari Girik, Akte Jual Beli, dan sejenisnya menjadi SHM sudah cukup baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Laki-Laki (4)	Perempuan (5)	Laki-Laki (6)	Perempuan (7)
SHM atas nama ART	85,33	85,84	84,00	84,92	84,44	85,30
SHM bukan atas nama ART	7,21	8,41	8,95	8,85	8,37	8,67
Sertifikat lain	2,61	2,40	1,48	1,84	1,86	2,07
Lainnya	4,85	3,35	5,57	4,39	5,33	3,96
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Sementara itu, dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal yang dimiliki.

2.2. Jenis dan Luas Lantai

2.2.1. Jenis Lantai Terluas

Dilihat dari segi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan dengan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori dari rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2010

Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Keramik/Marmer/Granit	20,39	11,37	14,06
Ubin/Tegel/Teraso	13,38	4,42	7,08
Semen/Bata Merah	49,88	47,61	48,28
Kayu/Papan	14,87	28,53	24,46
Bambu	0,03	2,05	1,45
Tanah	1,41	5,09	4,00
Lainnya	0,04	0,93	0,67
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Jenis lantai terluas yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Provinsi Papua Barat adalah semen/bata merah (48,28 persen). Diikuti oleh kayu/papan sebanyak 24,46 persen dan keramik/marmer/granit sebanyak 14,06 persen. Penggunaan semen/bata merah sebagai jenis lantai terluas banyak terdapat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

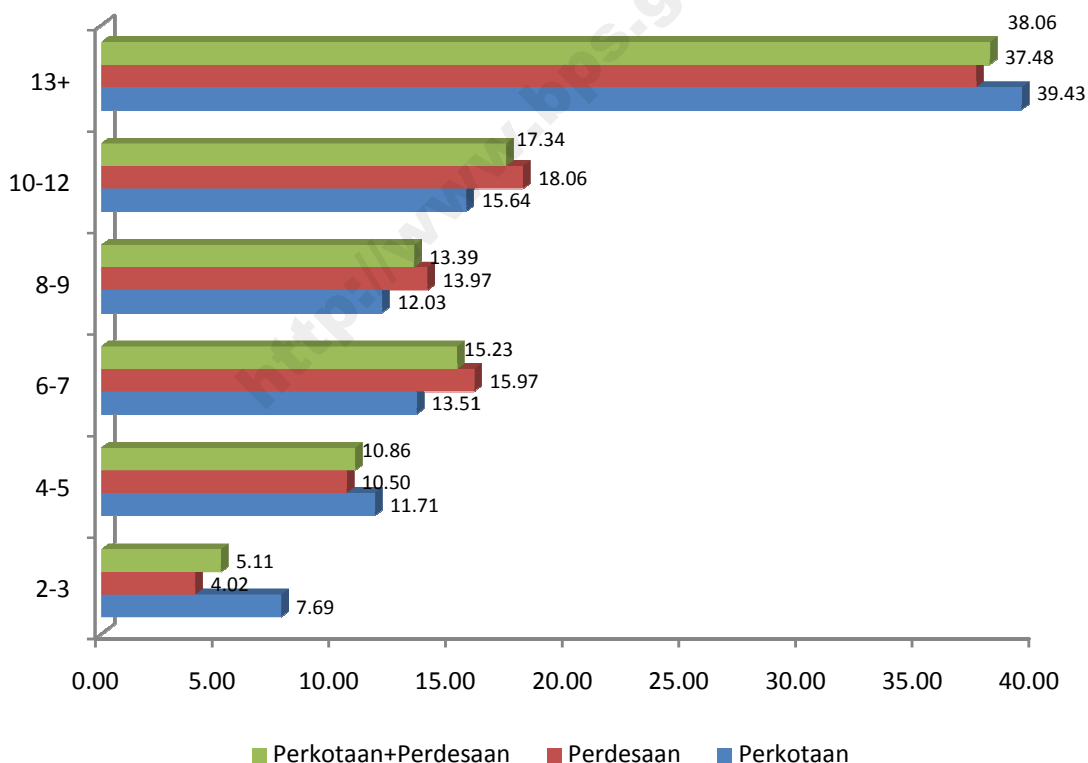
Sementara itu, penggunaan tanah sebagai jenis lantai terluas di Provinsi Papua Barat relatif kecil hanya 4,00 persen. Sebagian besar di antaranya adalah rumah tangga yang

tinggal di daerah perdesaan. Persentase rumah tangga di perdesaan yang menggunakan tanah sebagai jenis lantai terluas sebanyak 5,09 persen., sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 1,41 persen.

2.2.2. Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen bagi seluruh penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah total luas lantai dibagi total penduduk.

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita dan Tipe Daerah, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi Papua Barat memiliki luas lantai per kapita 13 m² atau lebih (38,06 persen). Dan sisanya tersebar rata di kategori luas lantai per kapita lainnya. Selain itu, di Provinsi Papua Barat tidak terdapat rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 2 m².

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 m², sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m².

Jika diklasifikasikan menurut Kementerian Kesehatan maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 8 m²) sebesar 68,79 persen. Sementara itu, menurut kalsifikasi WHO dan APHA maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 10 m²) sebesar 55,40 persen.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Rumah Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Kualitas Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lantai Per Kapita < 9 m ²	40,51	31,29	38,53	25,11	39,11	27,25
Lantai Tanah	1,41	1,45	5,08	5,20	4,01	3,90

Sumber : Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Kualitas rumah tinggal salah satunya dilihat dari luas lantai per kapita dan jenis lantainya. Rumah tinggal dikatakan kurang baik jika luas lantai per kapitanya kurang dari 9 m² dan berlantai tanah. Dilihat dari kedua hal tersebut, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki rumah tinggal yang lebih baik daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Hal ini dikarenakan persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 9 m² untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan (27,25 persen) lebih kecil daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki (39,11 persen). Begitu pula untuk rumah tangga dengan rumah tinggal berlantai tanah untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan (3,90 persen) lebih kecil daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki (4,01 persen).

2.3. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan di rumah tangga juga merupakan aspek perumahan yang perlu diperhatikan. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktifitas. Dari berbagai jenis penerangan, penerangan yang dianggap paling baik adalah listrik.

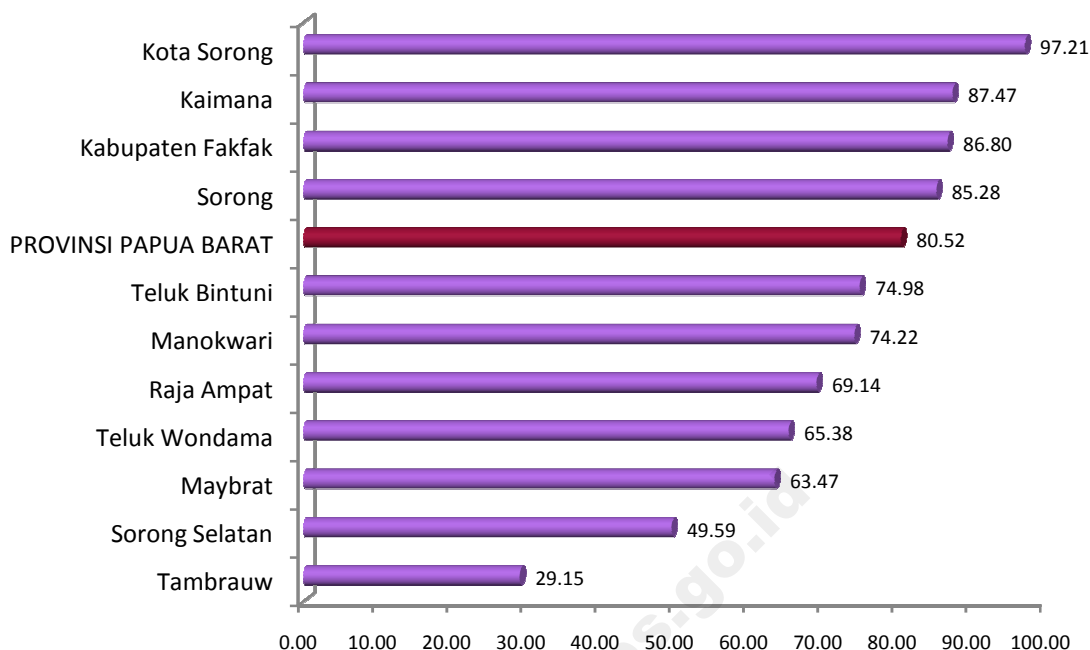
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2010

Sumber Penerangan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Listrik	98,10	73,08	80,52
- PLN Dengan Meteran	80,59	44,42	55,17
- PLN Tanpa Meteran	16,31	8,17	10,59
- Bukan PLN	1,20	20,49	14,76
2. Bukan Listrik	1,90	26,92	19,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Umum, SP 2010

Rumah tangga di Papua Barat yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan hanya sebesar 80,52 persen. Dengan kata lain, masih terdapat 19,48 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah tangga yang belum menggunakan listrik tersebut lebih banyak di perdesaan (26,92 persen) daripada di perkotaan (1,90 persen). Sementara jika dilihat dari sebaran kabupaten/kota, persentase penggunaan listrik terbesar terdapat di Kota Sorong yaitu 97,21 persen dan yang terkecil di Kabupaten Tambrauw yaitu 29,15 persen.

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Listrik menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber : Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Umum, SP 2010

2.4. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas), artinya apabila dalam satu rumah tangga terdapat lima orang anggota rumah tangga maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air (40 gelas) untuk keperluan minum. Oleh karena itu, perlu pengadaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga.

Air yang berasal dari dalam tanah mempunyai hubungan dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan air minum yang berasal dari dalam tanah perlu dikurangi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Berdasarkan hasil SP2010, kebutuhan air minum yang berasal dari dalam tanah (pompa, sumur terlindung, dan sumur tidak terlindung) masih diminati penduduk. Sebanyak 29,3 persen rumah tangga di Papua Barat menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2010

Sumber Utama Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan	33,95	12,86	19,13
Ledeng Sampai Rumah	23,12	8,19	12,63
Ledeng Eceran	4,03	1,20	2,04
Pompa	5,30	1,47	2,61
Sumur Terlindung	19,24	19,48	19,41
Sumur Tidak Terlindung	2,51	9,30	7,28
Mata Air Terlindung	2,81	9,96	7,84
Mata Air Tidak Terlindung	0,37	3,99	2,91
Air Sungai	0,65	14,86	10,63
Air Hujan	7,86	18,55	15,38
Lainnya	0,16	0,14	0,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Umum, SP 2010

Dari Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa air kemasan, ledeng, dan pompa lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan. Sedangkan sumur, mata air, air sungai, dan air hujan cenderung lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan. Penggunaan air kemasan di Provinsi Papua Barat cukup tinggi, dimana persentase penggunaan air kemasan (19,13 persen) menempati tempat kedua terbanyak setelah sumur terlindung (19,41 persen).

2.5. Sanitasi

2.5.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya. Berdasarkan hasil SP 2010, 16 persen rumah tangga di Provinsi Papua Barat tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Sebagian besar di antaranya berada di daerah perdesaan (21,49 persen), sementara di daerah perkotaan hanya 3,02 persen.

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2010

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban Sendiri	72,53	54,06	59,55
Jamban Bersama	22,20	14,15	16,54
Jamban Umum	2,25	10,30	7,91
Tidak ada	3,02	21,49	16,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Umum, SP 2010

2.5.2. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat penampungan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar seperti mempengaruhi kualitas air tanah dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Sekitar 77,61 persen rumah tangga di Provinsi Papua Barat telah menggunakan tangki septik/SPAL, dengan penyebarannya lebih banyak di perkotaan (88,23 persen) dibanding di perdesaan (72,05 persen).

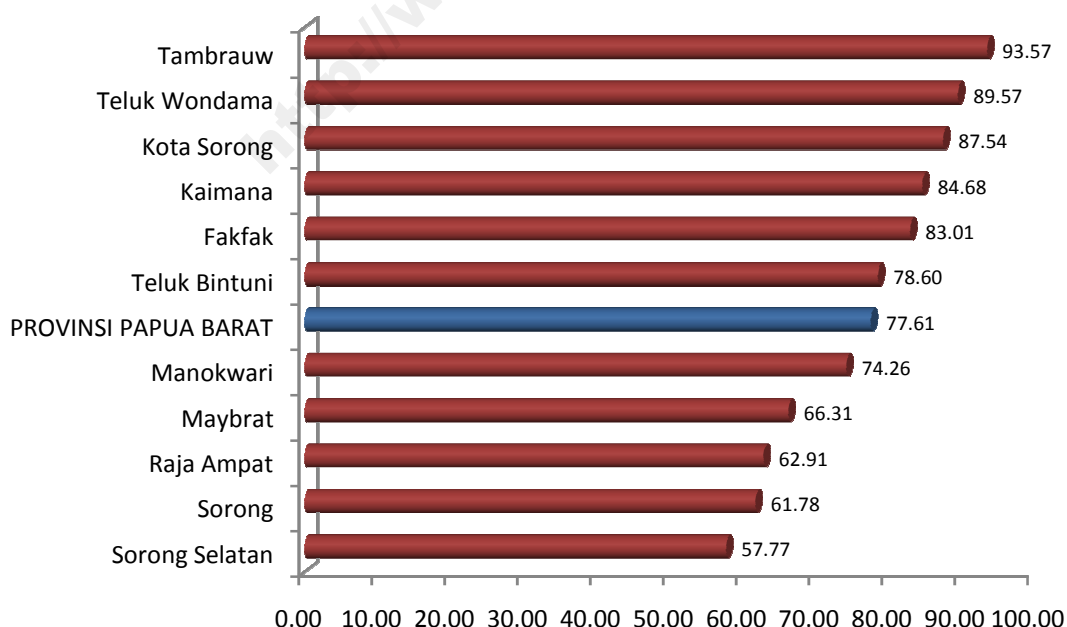
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2010

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki Septik	88,23	72,05	77,61
Tanpa Tangki Septik	7,04	14,22	11,75
Tidak Punya	4,73	13,73	10,64
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Jika dilihat dari sebaran kabupaten/kota, kabupaten yang memiliki persentase rumah tangga dengan tempat akhir pembuangan tinja berupa tangki septik yang terbesar adalah Kabupaten Tambrauw (93,57 persen). Sementara itu, kabupaten dengan persentase terkecil yaitu Kabupaten Sorong Selatan (57,77 persen).

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban dan Tempat Akhir Pembuangan Tinja Berupa Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber : Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

2.6. Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari

Secara umum bahan bakar untuk memasak dikelompokkan menjadi bahan bakar padat (kayu bakar, arang, dan lainnya) dan bahan bakar tidak padat (listrik, gas, dan minyak tanah). Isu penggunaan bahan bakar padat untuk memasak sedang hangat dibicarakan saat ini karena jenis bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi udara serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sumber daya hutan.

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak dan Tipe Daerah, 2010

Jenis Bahan Bakar untuk Memasak	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bahan Bakar Tidak Padat	90,05	37,65	53,27
- Listrik	0,84	0,39	0,53
- Gas	3,20	1,22	1,81
- Minyak Tanah	86,01	36,04	50,93
2. Bahan Bakar Padat	8,24	61,89	45,90
- Arang	0,12	0,12	0,12
- Kayu Bakar	7,87	61,64	45,62
- Lainnya	0,25	0,13	0,16
3. Tidak Pakai/Tidak Memasak	1,71	0,46	0,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Dari Tabel 12 terlihat bahwa persentase penggunaan bahan bakar padat untuk keperluan memasak secara umum di Provinsi Papua Barat cukup tinggi yaitu 45,90 persen. Jika dilihat lebih lanjut penggunaan bahan bakar tersebut berdasarkan tipe daerah maka terlihat ketimpangan yang cukup mencolok. Penggunaan bahan bakar padat untuk memasak di daerah perdesaan sangat tinggi sebesar 61,89 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya 8,24 persen. Selanjutnya jika dilihat lebih lanjut dari jenis bahan bakarnya, ada dua

jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan rumah tangga di Provinsi Papua Barat, yaitu kayu bakar (45,62 persen) dan minyak tanah (50,93 persen). Sementara itu, penggunaan bahan bakar gas untuk memasak masih sangat rendah hanya 1,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa program konversi minyak tanah ke gas di Provinsi Papua Barat masih belum berhasil.

2.7. Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal

Dalam SP 2010, kondisi ideal sebuah rumah tinggal dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas pokok yang biasanya digunakan oleh rumah tangga. Fasilitas tersebut antara lain : berlantai bukan tanah, menggunakan sumber penerangan listrik, bahan bakar memasak listrik/gas, dan mempunyai jamban sendiri dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik.

Tabel 13. Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah, Dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai Bukan Tanah	98,59	98,55	94,92	94,80	95,99	96,10
Penerangan Listrik	98,11	97,99	73,07	73,20	80,38	81,76
Memasak Pakai Listrik/ Gas	4,18	2,95	1,65	1,24	2,39	1,83
Memiliki Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	91,16	92,70	75,21	77,80	80,88	84,14

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Umum, SP 2010

Menurut Tabel 13, persentase fasilitas pokok rumah tinggal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun sedikit perbedaan terlihat pada rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik, yaitu untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan (84,14 persen) sedikit lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki (80,88 persen).

2.8. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Wikipedia Berbahasa Indonesia, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya telepon seluler).

Tabel 14. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010

Penguasaan Telepon	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Kabel	0,72	0,38	0,48
Telepon Seluler	81,38	48,60	58,36
Telepon Kabel dan Seluler	8,87	2,49	4,39
Tidak Punya	9,03	48,53	36,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Pada Tabel 14 diulas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telepon yang dirinci atas telepon kabel, telepon seluler, kemudian telepon kabel juga telepon seluler yang dikuasai oleh suatu rumah tangga. Jika dibandingkan antar keduanya, telepon seluler lebih banyak digunakan (58,36 persen) daripada telepon kabel (0,48 persen).

Sedangkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki baik telepon kabel maupun telepon seluler juga cukup besar, yaitu 36,77 persen.

Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet selama Tiga Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010

Akses Internet	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	17,47	9,32	11,75
Tidak	82,53	90,68	88,25
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP 2010

Akses internet selama tiga bulan terakhir di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah, hanya 11,75 persen. Banyaknya rumah tangga yang mengakses internet tersebut, lebih banyak di perkotaan (17,47 persen) daripada di perdesaan (9,32 persen). Sudah seharusnya fenomena ini menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah. Karena di zaman yang serba modern ini sudah seharusnya internet akrab digunakan oleh semua masyarakat.

<http://www.bps.go.id>

BAB III. PENUTUP

Permasalahan perumahan dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Jumlah penduduk yang besar serta keterbatasan lahan yang tersedia dapat mendorong tingginya permintaan terhadap kebutuhan perumahan. Tingginya permintaan tersebut harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat (sisi penawaran). Penting bagi pemerintah untuk mengusahakan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, karena bila terjadi ketidakseimbangan dapat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Dengan diterbitkannya publikasi ringkas ini, kami berharap dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat di bidang perumahan dengan menyediakan data perumahan hasil SP2010 sehingga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran kebutuhan perumahan dapat tercapai.

Tentu saja publikasi ini masih ada yang perlu diperbaiki agar menjadi sempurna. Kami akan menampung segala kritik dan saran dari pembaca, karena jiwa yang besar adalah jiwa yang mau menghargai pendapat orang lain. Semoga bermanfaat.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: +62 021 3841195, 3842508, 3810291, Fax.: +62 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISBN. 978-979-064-450-2



9 789790 644502